

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Muliari, 2011).

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensipenerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian (Euphrasia Susy Suhendra, 2010)

Menurut Sri Rustianingsih (2011) penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Selama lima tahun terakhir, penerimaan pajak rata-rata senilai 80 persen

dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar di masa yang akan datang, karena pemerintah ingin mengurangi jumlah utang untuk mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan pajak membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih baik sehingga penerimaan pajak semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan target penerimaan pajak yang tepat dan optimal dengan menerapkan kepatuhan pajak pada masyarakat.

Pendapatan negara pada periode 2008—2012 terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, secara nominal pendapatan negara meningkat rata-rata sebesar 8,1% per tahun, dari Rp981,6 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp1.338,1 triliun pada tahun 2012. Pendapatan negara terdiri atas pendapatan dalam negeri yang tumbuh 8,0% per tahun dan memberikan kontribusi rata-rata 99,7%, serta penerimaan hibah yang tumbuh 25,9% dengan kontribusi rata-rata 0,3%.

Dalam APBNP 2013, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.502,0 triliun, meningkat 12,2% dari realisasinya dalam tahun 2012. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.497,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp4,5 triliun. Perkembangan pendapatan negara tahun 2008—2013 disajikan dalam Tabel 1.1 .

**TABEL 1.1**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2008-2013\*)**  
**(triliun rupiah)**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	APBN P 2013
<b>I PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	979,3	847,1	992,2	1.205,3	1.332,3	1.497,5
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>658,7</b>	<b>619,9</b>	<b>723,3</b>	<b>723,3</b>	<b>980,5</b>	<b>1.148,4</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	622,4	601,3	694,4	819,8	930,9	1.099,9
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	327,5	317,6	357,0	431,1	465,1	538,8
a) Pendapatan PPh Migas	77,0	50,0	68,9	73,1	83,5	74,3
b) Pendapatan PPh Nonmigas	250,5	267,6	298,2	358,0	381,6	464,5
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Bawang Goreng	209,6	193,1	230,6	277,8	337,6	423,7
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	25,4	24,3	28,6	29,9	29,0	27,3
4) Pendapatan BPHTB	5,6	6,5	8,0	-	-	-
5) Pendapatan Cukai	51,3	56,7	66,2	77,0	95,0	104,7
6) Pendapatan Pajak Lainnya	3,0	3,1	4,0	3,9	4,2	5,4
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36,3	18,7	28,9	54,1	49,7	48,4
1) Pendapatan Bea Masuk	22,8	18,1	20,0	25,3	28,4	30,8
2) Pendapatan Bea Keluar	13,6	0,6	8,9	28,9	21,2	17,6
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>320,6</b>	<b>227,2</b>	<b>268,9</b>	<b>331,5</b>	<b>351,8</b>	<b>349,2</b>
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	224,5	139,0	168,8	213,8	225,8	203,7
1) Pendapatan SDA Migas	211,6	125,8	152,7	193,5	205,8	180,6
a) Pendapatan Minyak Bumi	169,0	90,1	111,8	141,3	144,7	129,3
b) Pendapatan Gas Bumi	42,6	35,7	40,9	52,2	61,1	51,3
2) Pendapatan SDA Nonmigas	12,8	13,2	16,1	20,3	20,0	23,1
a) Pendapatan Pertambangan Umum**)	9,5	10,4	12,6	16,4	15,9	18,1
b) Pendapatan Kehutanan	2,3	2,3	3,0	3,2	3,2	4,3
c) Pendapatan Perikanan	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
d) Pendapatan Panas Bumi	0,9	0,4	0,3	0,6	0,7	0,5
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	29,1	26,0	30,1	28,2	30,8	36,5
c. PNBP Lainnya	63,3	53,8	59,4	69,4	73,5	85,5
d. Pendapatan BLU	3,7	8,4	10,6	20,1	21,7	23,5
<b>II PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,8</b>	<b>4,5</b>
<b>Jumlah</b>	<b>981,6</b>	<b>848,8</b>	<b>995,3</b>	<b>1.210,6</b>	<b>1.336,1</b>	<b>1.502,0</b>

\*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

\*\*\*) Sejak tahun 2013 menjadi pendapatan pertambangan mineral dan batu bara

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam periode 2008—2012, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan secara signifikan, dari Rp658,7 triliun (2008) menjadi Rp980,5 triliun (2012). Sejalan dengan makin meningkatnya penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara juga meningkat, dari 67,3%

(2008) menjadi 73,6% (2012). Pendapatan pajak dalam negeri dalam periode tersebut meningkat rata-rata sebesar 10,6% per tahun, sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional meningkat rata-rata sebesar 8,1% per tahun. Dilihat dari kontribusinya, pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional memberikan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 95,2% dan 4,8%.

Pendapatan pajak dalam negeri dalam periode 2008—2010 terdiri atas pendapatan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Sejak tahun 2011, pendapatan BPHTB sudah bukan merupakan bagian dari pendapatan pajak dalam negeri karena telah dialihkan sebagai pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak dalam negeri dalam periode 2008—2012 terutama berasal dari pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dengan kontribusi rata-rata sebesar 51,9%, serta pendapatan PPN dan PPnBM dengan kontribusi rata-rata sebesar 33,8%. Sementara itu, pendapatan pajak perdagangan internasional dalam periode 2008—2010 terutama berasal dari pendapatan bea masuk, sedangkan pendapatan bea keluar masih rendah.

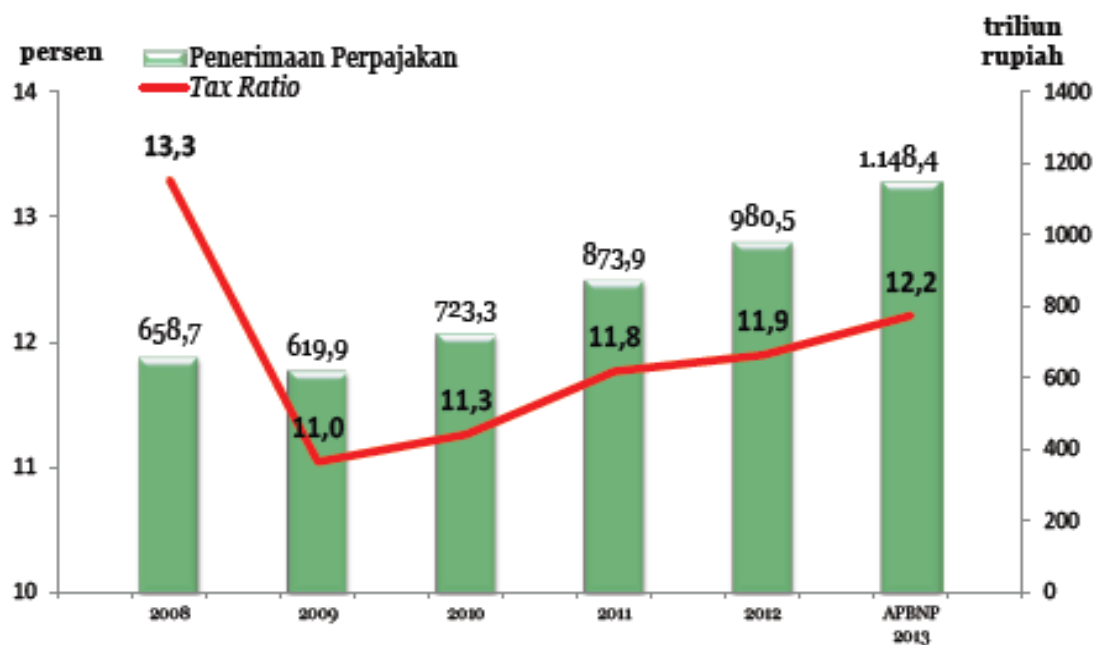
Namun, sejak tahun 2011 pendapatan bea keluar meningkat secara signifikan sehingga hampir sama dengan pendapatan bea masuk, sebagai akibat dari kenaikan harga CPO serta kebijakan Pemerintah dalam rangka penghiliran CPO yang menyebabkan pengenaan tarif bea keluar CPO makin tinggi dan progresif. Bisa dijelaskan dengan tabel berikut:

Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2013 ditargetkan mencapai Rp1.148,4 triliun, naik 17,1% dari realisasinya dalam tahun 2012. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut antara lain adalah terjaganya pertumbuhan ekonomi, terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dan pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau rata-rata sebesar 8,5%. Perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2008—2013 disajikan

Dalam grafik1.1.

**Grafik 1.1**

**Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2008-2013**



Sumber: Kementerian Keuangan

Kepatuhan pajak mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju

maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindak penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, kesadaran teknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara dalam hal pembayar pajak, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak secara nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**

<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>WP Badan</b>	1,608,337	1,760,108	1,929,507	2,136,014	2,218,573
<b>WP Orang Pribadi</b>	13,861,253	16,880,649	19,881,684	22,131,323	23,082,822
<b>WP Bendahara</b>	441,986	471,833	507,882	545,232	555,995
<b>Total</b>	15,911,576	19,112,590	22,319,073	24,812,569	25,857,390

Sumber: DJP, 2013

Menurut Agus D Martowardojo dikutip dari ([www.vivanews.com](http://www.vivanews.com)) diakses 14 februari 2013, bila dibandingkan potensi pajak dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta orang, kekayaan alam yang berlimpah, jumlah badan usaha yang lebih dari 20 juta, Indonesia bisa terus meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Namun perlu dilakukan kerja keras dan cerdas serta langkah-langkah terobosan dibidang ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak serta perbaikan secara fundamental dalam pelayanan kepada Wajib Pajak dan administrasi perpajakan.

Fakta menunjukkan, lanjut Agus D Martowardojo, tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. Untuk WP Badan pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 8,5 juta, padahal jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia berjumlah 110 juta (data BPS). Artinya, rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencapai 7,73%; dengan kata lain tingkat kepatuhan WP Badan masih sangat rendah.

Menurut APBN sumber pendapatan pemerintah terbanyak didapat dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara 3 yang berasal dari pajak, dan untuk tahun 2010 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 729,2 triliun yang kurang lebih merupakan 70% dari penerimaan APBN tahun 2010 akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan

pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak secara tidak langsung.

Adapun fenomena yang menyangkut tingkat kepatuhan wajib pajak menurut Fuad Rahmany yang dikutip dari ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)) “40 juta orang yang belum membayar pajak disebut koruptor” pada hari rabu, 23 September 2013 mengatakan bahwa :

Ada sekitar 40 juta individu dan 5 juta badan usaha belum membayar pajak. Sedangkan WP badan usaha yang sudah menyetorkan pajak sebanyak 520 ribu dari 20 juta perusahaan di tanah air. Lalu fuad menambahkan padahal jika sebanyak 5 juta badan usaha dan 40 juta WP tersebut menyetor pajak, maka penerimaan pajak di Indonesia akan sangat besar, bahkan mencapai dua kali lipatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN”** (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini penulis membuat ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
2. Bagaimana tingkat penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan badan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan badan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berkembang dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak. Juga sebagai salah satu syarat dalam memenuhi ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Bagi Instansi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terutama dalam masalah yang menyangkut Kepatuhan Wajib Pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

c. Bagi pihak lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

## **1.5 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara, Jl. Asia Afrika No. 114
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Jl. Ibrahim Adjie (d/h Kiaracondong) No 372
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, Jl. Purnawarman No. 21
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas, Jl. SoekarnoHatta No. 781
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega, Jl. SoekarnoHatta No. 216